



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2022- 2027**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR
JL. WR. SUPRATMAN NO. 4 PEMATANGSIANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting. Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi dibidang komunikasi dan informasi, agenda reformasi dibidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyeberan informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratis, sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan good governance.

Bidang Komunikasi dan Informasi di era digital ini sangatlah penting, kehadirannya dalam bentuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia tentunya megadopsi visi ini, terutama dengan menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif Pengembangan sumber daya manusia, yang juga berisikan penciptaan masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan pemerintahan kepada publik

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar merupakan Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi, informatika, statistik dan Persandian tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratis sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan good governance.

Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik dibidang kominfo yang dilaksanakan maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di wilayah Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) setiap perangkat daerah tersebut dijadikan sebagai masukan, evaluasi dalam menyempurnakan Rencana Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

E-Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara peneyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumber daya aparatur sebagai pelayanan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.

Perubahan Rencana Strategis (renstra) merupakan suatu dokumen yang dihasilkan dari kegiatan perencanaan strategis yang telah dievaluasi , perubahan perencanaan strategis adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi dalam penentuan strategi dan pengambilan keputusan pengalokasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran strategis dan pengambilan keputusan pengalokasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran strategi yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju lima tahun kedepan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar berfungsi sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun kedepan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun berdasarkan analisis terhadap dinamika perubahan baik lingkungan baik nasional maupun Pemerintah Kota Pematangsiantar. Selain itu Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Ini juga disusun dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pencapaian sasaran strategis, agenda dan misi pembangunan Kota Pematangsiantar.

Proses Perubahan perencanaan strategis ini untuk menghasilkan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar 2022-2027 dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri tersebut mengatur secara rinci tahapan proses perencanaan yang harus dilaksanakan oleh Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dalam hal ini Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar bukanlah suatu dokumen perencanaan yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian integral dari Dokumen Perencanaan organisasi induknya yaitu Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Kegiatan Pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan melalui Visinya "TERWUJUDNYA KOTA PEMATAG SIANTAR SEHAT, SEJAHTERA DAN BERKUALITAS". Atas dasar itulah Pemerintah Kota Pematangsiantar Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan urusannya yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI 5887), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 11447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1419);
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, prosedur dan kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2012 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2013 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027
24. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar;
25. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
26. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar adalah untuk memberikan pedoman/arahan bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Komunikasi Informatika Kota Pematang Siantar dalam melaksanakan perencanaan lima (5) tahun kedepan dengan berpedoman pada RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 sehingga menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, dan akuntabel.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 adalah :

- a. Sebagai panduan dan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan agar terarah dan berkesinambungan.
- b. Memberikan landasan operasional bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan Rencana Kerja.
- c. Menjadi alat ukur menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika Sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menjelaskan tugas dan fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Konsumen Pelayanan dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menjelaskan Permasalahan dengan cara identifikasi permasalahan, Penentuan Isu startegis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Ini menjelaskan tentang Tujuan perangkat Daerah, Sasaran perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini menjelaskan tentang strategi, atau cara perangkat daerah memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki dalam mewujudkan tujuan PD, dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan berbagai program, indikator kinerja dan target kinerja outcome perangkat daerah setiap tahun dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB VIII PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar dan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kota Pematangsiantar serta Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar menjalankan tugas pokoknya, yaitu :

a. Tugas Pokok ;

Membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.

b. Fungsi;

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok Dinas Komunikasi Informatika Kota Pematangsiantar memiliki fungsi antara lain :

- Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan informasi, komunikasi, statistik dan persandian
- Penyusunan rencana program dan anggaran informasi dan komunikasi publik pemerintah kota.
- Pelaksanaan pengkajian lingkup urusan pemerintah bidang pengelolaan informasi dan komunikasi, statistic dan persandian pemerintah kota.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan urusan pemerintah bidang informasi dan komunikasi, statistic dan persandian pemerintah kota.
- Pengelolaan nama domain-domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkungan pemerintah kota.
- Pengelolaan E-government di lingkungan Kota Pematangsiantar.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur organisasi;

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah Kota Pematangsiantar bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik Kota Pematangsiantar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Persandian. memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan komunikasi, statistik dan persandian publik pemerintahan kota;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran informasi dan komunikasi Publik pemerintah kota;
- c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan urusan pemerintahan informasi dan komunikasi, statistik dan persandian pemerintah kota;
- e. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkungan kota;
- f. Pengelolaan e-government di lingkungan kota Pematangsiantar; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas merupakan unsur staf yang dipimpin seorang sekretaris dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan perkantoran, kerumahtanggaan dan barang inventaris lainnya, dan mengkoordinasikan program/kegiatan yang diselenggarakan

bidang-bidang. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan asset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan dinas;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas; dan
- d. Pelaksanaan koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang lingkungan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penjabaran Tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 207 dibagi kedalam subbagian yang dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah ini bertanggungjawab kepada sekretaris dinas sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
 - Menyelenggarakan urusan yang meliputi perencanaan program/kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan dinas;
 - Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, penggajian pegawai, pelaporan keuangan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LPH) di lingkungan dinas; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - Menyelenggarakan manajemen perkantoran/ ketatausahaan (pengadaan surat menyurat, pendistribusian dan menyurat, pengarsipan surat menyurat), hubungan masyarakat di lingkungan dinas;
 - Menyelenggarakan manajemen rumah tangga serta pengadaan pemeliharaan, inventarisasi asset di lingkungan dinas;
 - Menyelenggarakan manajemen rumah tangga serta pengadaan pemeliharaan, inventarisasi asset di lingkungan dinas;
 - Menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian koordinasi pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas dan;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan unsur yang dipimpin seorang Kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan melaksanakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkungan pemerintah kota;
- b. Mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan dan media komunikasi publik;
- d. Melakukan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- e. Melakukan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah kota;
- f. Melakukan pelayanan informasi publik dan pelayanan kehumasan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Layanan Komunikasi

Bidang Layanan komunikasi merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan program rencana kerja dibidang komunikasi dan informatika;
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan di bidang teknologi informatika;
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan di bidang teknologi informasi;
- d. Melakukan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi.
- e. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi bidang teknologi informatika;
- f. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang teknologi informatika. Dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penyelenggaraan E-Government

Bidang Penyelenggaraan E-Government merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang penyelenggaraan E-Government yang mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pelayanan pendaftaran nama domain dan sub domain bagi kepentingan kelembagaan pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- b. Melakukan pelayanan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan data center (DC), command center (CC) dan disaster recovery center (DRC) dan pelayanan pengembangan dan inovasi Teknologi, Informasi Komunikasi (TIK) dalam implementasi E-Government;
- c. Melakukan pelayanan keamanan informasi E-Government
- d. Melakukan pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota Pematangsiantar;
- e. Melakukan pelayanan manajemen data dan informasi e-government
- f. Melakukan pelayanan akses internet dan intranet
- g. Melakukan penelitian, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- h. Melakukan integrasi layanan publik ke pemerintahan;
- i. Menyelenggarakan ekosistem teknologi informasi komunikasi (TIK) smart city;
- j. Menyelenggarakan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- k. Mengembangkan sumber daya teknologi informasi komunikasi (TIK) Pemerintah Kota Pematangsiantar; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Komunikasi Informatika Kota Pematang Siantar berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Oktober Tahun 2022 berjumlah 43 orang. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, Dinas Komunikasi Dan Informatika menjalankan fungsinya untuk urusan bidang komunikasi dan informasi, urusan statistic dan urusan persandian

Fungsi untuk urusan komunikasi dan informtika, statsitik serta persandian merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Layanan Komunikasi, Bidang Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik, Bidang Penyelenggaraan E-Government. Ketiga bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh urusannya dalam kegiatan serta program programnya, sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No.	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN
1	Eselon II	1	3,57
2.	Eselon III	4	14,29
3.	Eselon IV	2	7,14
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	7	25,00
5.	Jabatan Fungsional Umum	14	50,00

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar, Mei 2024

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan informatika Kota pematangsiantar memiliki Pegawai 28 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 15 Orang Tenaga Harian Lepas. Dari Jumlah Pegawai sebanyak 28 Orang tersebut terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon IIb) sebanyak 1 Orang, Sekretaris (Eselon IIIa) sebanyak 1 Orang, Kepala Bidang (Eselon IIIb) sebanyak 3 Orang, Kasubbag (Eselon IVa) sebanyak 2 Orang, Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 7 Orang, Jabatan Pelaksana sebanyak 14 Orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 15 orang.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pematang Siantar Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai
1.	Perguruan Tinggi						
	S2	7	25,00	16,28	0	0,00	0,00
	S1	14	50,00	32,56	6	40,00	13,96
	D3	2	7,14	4,65	0	0,00	0,00

2.	Bukan Perguruan Tinggi						
	SMA	5	17,86	11,63	8	53,33	18,60
	SD	0	0	0	1	6,67	2,34
	Jumlah	28	100,00	65,11	15	100,00	34,89
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		43					

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo Kota Pematang Siantar, Mei 2024

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 14 orang (50,00%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika secara umum.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan informatika yang menamatkan pendidikan S-2 ,tercatat sebanyak 7 orang. Secara persentase, jumlah tersebut mencapai 25,00 % dari seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika , sebagai lembaga yang memposisikan dirinya sebagai Penyelenggara smart city Pemerintah Kota Pematang Siantar, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika secara optimal.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar adalah sedikitnya Aparatur Sipil Negara yang berkompetensi dibidang Teknologi Informasi dan komunikasi sehingga salah satu faktor penghambat dalam mencapai program-program yang telah direncanakan, serta mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional untuk pranata humas, sandiman, manggala informatika, statistisi, serta masih banyak pejabat fungsional yang masih dibutuhkan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menunjang fungsi urusan urusannya antara lain : analisis kepegawaian, analisis sumber daya manusia aparatur, arsiparis ahli muda, arsiparis ahli pertama, asesor sumber daya

manusia aparatur, penguji perangkat telekomunikasi, pranata ahli komputer pertama,

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	17	60,71	39,53	10	66,67	23,26
2.	Perempuan	11	39,29	25,58	5	33,33	11,63
	Jumlah	28	100,00	65,11	15	100,00	34,89
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		43					

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar, Mei 2024

Sumber daya manusia (SDM) yang ada berdasarkan data kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar pada tahun 2032, ada dua yaitu jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 28 pegawai, yang terdiri dari 17 pegawai laki-laki (60,71 %) dan 11 pegawai perempuan (39,29 %) dan pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 15 pegawai, yang terdiri dari 10 pegawai Non ASN laki-laki (66,67 %) dan 5 pegawai Non ASN perempuan (33,33 %). Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pematang Siantar adalah sebanyak 43 pegawai.

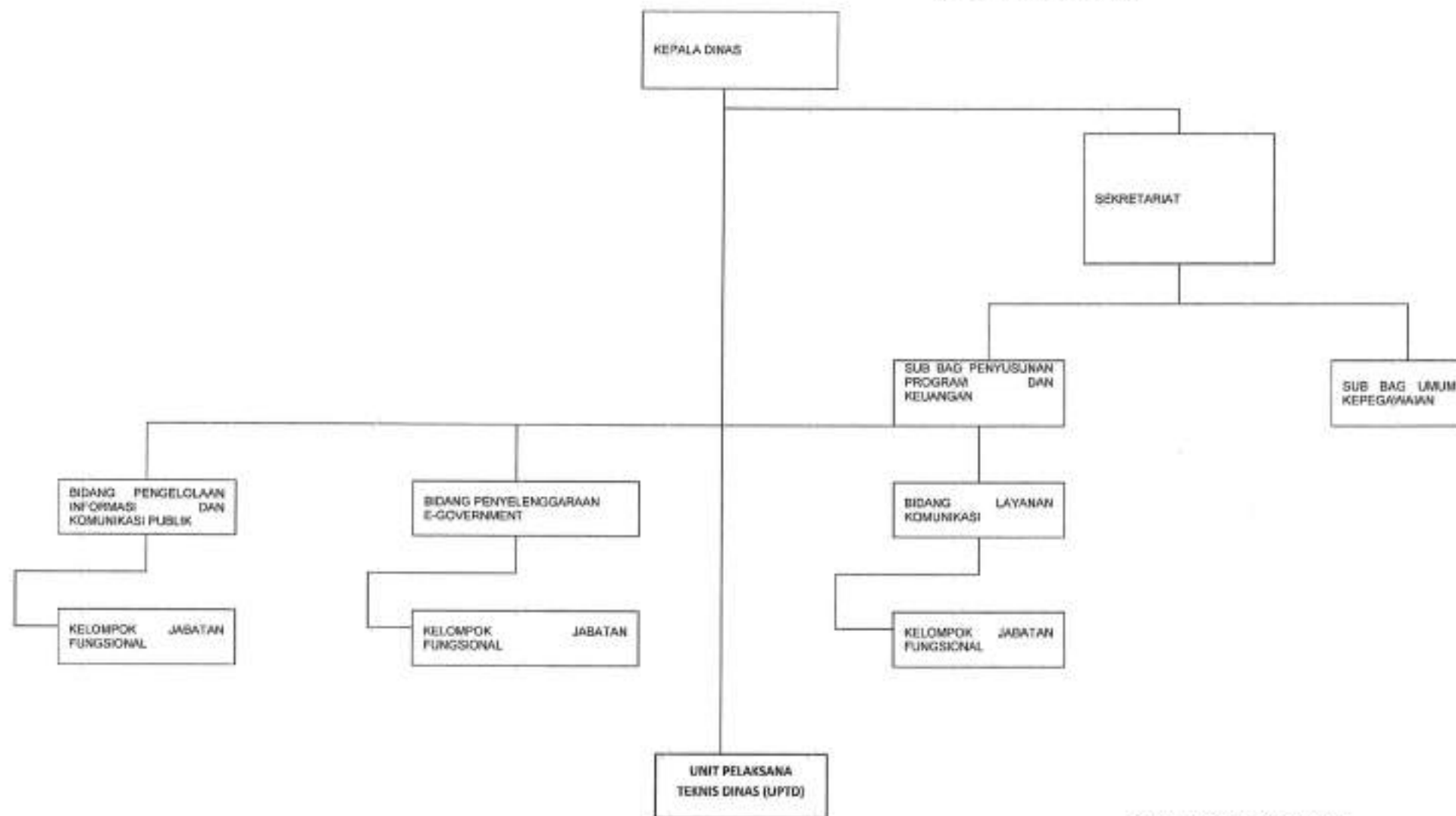
Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Golongan Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN
1	Golongan IV		
	IV/c	0	0,00
	IV/b	2	7,14
	IV/a	4	14,29
2	Golongan III		
	III/d	8	28,57
	III/c	3	10,71
	III/b	0	0,00
	III/a	5	17,86
3	Golongan II		
	II/d	4	14,29
	II/c	1	3,57
	II/b	1	3,57
	II/a	0	0,00
	Jumlah	28	100,00

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pematang Siantar, Mei 2024



PIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

SUSANTI DEWAYANI

2.2.2. Aset Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	Nama Barang	Tahun	Jumlah	KEADAAN BARANG		
				B	RB	KB
1.	Tanah Bagunan Kantor pemerintah	1992	1	B		
2.	Electric Generating Set Lainnya	2017	1	B		
3.	Pompa Air	2021	1	B		
4.	Kendaraan Dinas Roda 4	2001	2	B		
5.	Sepeda Motor	1997,2017, 2019	7	B		
6.	Global Positioning System	2017	1	B		
7.	Alat ukur Jarak dan ketinggian	2017	1	B		
8.	Alat Ukur Grounding	2017	1	B		
9.	Filling Cabinet Besi	2017, 2019	9	B		
10.	Brankas	1992	1			KB
11.	CCTV Camera Control Television System	2021	5	B		
12.	Papan Visual	2017	6	B		
13.	Penghancur kertas	2017	3	B		
14.	Mesin Absensi	2018	1	B		
15.	Overhead projector	2017, 2018	3	B		
16.	Papan Nama Instansi	2017	1	B		
17.	Papan Pengumuman	2017	1	B		
18.	Mesin faxmille	2015	1	B		
19.	Meja rapat	2017, 2018	2	B		
20.	Kursi Rapat	2017	8	B		
21.	Kursi Tamu	2015	1	B		
22.	Kursi Putar	2013,2014, 2016, 2019	20	19		1
23.	Bangku Tunggu	2012	2	B		
24.	Kursi Lipat	2015,2017	40	B		
25.	Sofa	2019	1	B		

26.	Meja televisi	2012	1	B					
27.	AC window	2016	1	B					
28.	AC Split	2001, 2017, 2018, 2021	17	16	1				
29.	Kipas Angin	2016	2	B					
30.	Televisi	2012, 2017	4	3	1				
31.	Loudspeaker	2001, 2017	2	B					
32.	Soundsystem	2017	1	B					
33.	Wireles	2018	2	B					
34.	Microphone Table stanc	2017	1	B					
35.	UPS	2017	1	B					
36.	Camera Video	2017	2	B					
37.	Gorden	2019	1	B					
38.	Karpet	2019	28	B					
38.	Alat Finger pembuka Pintu	2017	3	B					
39.	Alat pemadam Portable	2018	2	B					
40.	Meja kerja	2017, 2019	33	B					
41.	Meja Operator	2018	1	B					
42.	Kursi Kerja	2017	21	19	2				
43.	Lemari Buku Arsip	2019	6	B					
44.	Bufet kaca	2017	5	B					
45.	Webcam	2017	1	B					
46.	CCTV	2017	4	B					
47.	Camera Elektronik	2018	1	B					
48.	Vidio Monitor	2018	12	B					
49.	Vidio Processor	2017	1	B					
50.	Converter HDMI ke USB	2020	4	B					
51.	HT	2019	12	B					
52.	Faxmile	2011	1	B					
53.	Teleconference	2018	1	B					
54.	Unit Trancivier Ssb Portable	1997	1		1				
55.	Radio Base Stasion	1992	1		1				

56.	Unit Transcivier UHF Stationary	2019	1	B		
57.	Wireless Amflifier	2017	1	B		
58.	Microwave FPU portable	2018	2		2	
59.	Concreate Tower	2018	1		1	
60.	Ketel pemasak	2019	2	B		
61.	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	2017	4	B		
62.	PC Unit	2011, 2017, 2019, 2021	21	20	1	
63.	Laptop	2017, 2019	17	12	5	
64.	Printer	2016, 2017, 2019, 2021	26	17	9	
65.	External	2015, 2019	2		2	
66.	Server	2017, 2019	2	B		
67.	Router	2017, 2018	2		RB	
68.	Hub	2018	1		RB	
69.	Firewall	2017	1		RB	
70.	Switch	2017	1		RB	
71.	Switch Unmanaged	2017	1		RB	
72.	Link Balancer	2017	1		RB	
73.	Bangunan Gedung kantor Permanen	2018	1	B		
74.	Bangunan Milik Sekretariat daerah	2018	1	B		
75.	Bangunan Menara Telekomunikasi	2017, 2020	10	9	1	
77.	Instalasi Komunikasi elektronik	2017	1	B		
78.	Jaringan Telepon diatas tanah kapasitas sedang	2017	1	B		

Lokasi Kantor Dinas yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar dan berdekatan dengan kompleks perkantoran Pemerintah Kota Pematang Siantar di Jl. Merdeka. Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.

Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman era digitalisasi sangatlah berkembang dengan pesat, maka sangatlah penting peranan sarana yang cukup memadai untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi dimasa depan. Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pematang Siantar masihlah sangat kurang dalam hal sarana dan prasarana pendukung, seperti di lima puluh tiga kelurahan jaringan komunikasi masih menggunakan jaringan radio link, OPD masih ada yang menggunakan jaringan radio link, puskesmas- puskesmas belum menggunakan akses yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan informatika, sarana prasarana pendukung pengolahan informasi, sarana pendukung untuk persandian, sarana pendukung untuk statistik, sarana pendukung untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum memadai.

Di dalam Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan dalam Tempat Kerja disebutkan bahwa Setiap tempat kerja harus dibuat dan diatur sedemikian rupa, sehingga tiap orang yang bekerja dalam ruangan itu mendapat ruang udara (*cubic space*) yang sedikit-dikitnya 10 M³ sebaiknya 15 M³. Dengan demikian, dilihat dari segi ketersediaan ruang kerja, gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar sudah memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat daerah Kota Pematang Siantar dapat diukur dari pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pematang Siantar dan Indikator Kinerja Kunci, untuk melihat capaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel.TC.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pematang Siantar

NO	Indikator	Target Indikator	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target OPD Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun Ke-			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah OPD yang Memiliki Website dan melakukan updating	OPD			50	70	90	100	0	0	0	50 %
2.	Ketersediaan Sarana penerimaan keluhan/aduan masyarakat (membangun siantar smart city)	-Ada			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Jumlah Surat kabar Nasional	Media Cetak			60/7	60/7	60/7	60/7	11	11	11	11
4.	Jumlah penyiaran Radio/TV Lokal	Stasiun			12	12	12	12	15	15	13	11
5.	Jumlah website Milik Pemerintah daerah	Website			1	1	2	3	1	1	2	2
6.	Jumlah Pameran/Expo	Kali			3	3	3	3	0	0	0	0
7.	Jumlah Jaringan Komunikasi	Buah			72	72	72	73	72	72	124	124
8.	Persentase OPD yang menggunakan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika		%		100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	Persentase OPD yang menggunakan akses internet yang berkualitas (minimal 2 Mbps)		%		100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari 9 indikator ada indikator yang tidak mencapai target sama sekali yaitu Jumlah Pameran/ Expo diakibatkan kurangnya SDM dibidang TIK dan belum Optimalnya SPBE sehingga tidak dapat menyampaikan kepada masyarakat melalui pameran layanan layanan yang ada dipemerintahan Kota Pematang Siantar. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota pematangsiantar Pembuatan Website di Organisasi Perangkat Daerah yang ada Dikota Pematang Siantar belum mencapai target yang diinginkan disebabkan kurangnya ASN yang berkompetensi dibidang TIK, sehingga pada tahun 2019 meekrut 2 programmer, dan pada tahun 2020-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar merekrut 1 programmer dan ASN yang berkompetensi dibidang TIK hanya 4 Orang yang masuk pengangkatan CPNS Tahun 2021, dan 2 orang yang memiliki kemampuan design untuk pembuatan website.

2.3.2. Capaian Kinerja Keuangan

Jika dilihat tren selama lima tahun terakhir, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar mendapat alokasi anggaran dengan cenderung menurun yakni dari sebesar Rp. 5.840.556.500,00 di tahun 2017 menjadi sebesar Rp.6.394.976.754,00 di tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 10,53 % Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2017-2021 beserta serapannya sebagai tabel berikut :

Tabel 2.6

Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2021

No.	Tahun Anggaran (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2017	5.840.556.500	5.394.116.012	92,35
2.	2018	7.839.899.220	7.684.832.051,96	98,02
3.	2019	6.899.371.000	5.546.145.180,76	80,38
4.	2020	8.559.797.674	7.667.472.895	89,57
5.	2021	6.394.976.759	5.919.382.725	92,56

-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.800.000	25.500.000	48.998.056	25.883.135	-	28.799.900	25.498.500	48.968.450	25.446.200	-	99,99	99,99	99,93	98,31	-	-0,16	8
-	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	17.960.000	13.945.000	11.754.350	7.190.520	-	17.859.950	13.892.900	11.758.500	7.178.100	-	99,99	99,62	99,95	98,79	-	-0,44	-102
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000	3.000.000	2.991.075	3.139.500	-	2.000.000	2.995.600	2.989.150	3.135.000	-	100	99,99	99,93	99,85	-	-0,13	29
-	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.000.000	7.000.000	26.445.000	21.800.000	-	7.000.000	6.975.000	5.340.000	7.400.000	-	100	99,64	20,19	33,94	-	0,40	-10
-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	236.000.000	400.000.000	448.450.000	111.586.000	-	224.863.688	393.224.278	319.887.277	106.297.397	-	95,28	98,30	71,35	95,26	-	-0,23	-38
-	Penyediaan jasa operasional - THUP NS Daerah	58.650.000	326.005.000	526.829.552	268.996.378	-	53.200.000	294.886.100	437.365.000	237.570.000	-	90,70	90,45	83,01	88,31	-	0,92	432
-	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.023.350.000	100.200.000	727.436.148	218.553.300	-	903.252.900	70.004.900	366.613.328	202.193.750	-	88,26	69,66	50,39	92,51	-	0,91	262

-	Pengadaan Peralatan gedung kantor	560.366.000	6.000.000	530.203.148	10.000.000	-	511.557.900	6.000.000	310.057.000	10.000.000	-	91,28	100	58,47	100	-	21,00	0
-	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	45.984.000	75.200.000	83.660.000	9.995.300	-	28.375.000	46.429.400	42.424.929	5.688.750	-	61,70	61,74	50,71	56,91	-	-0,28	484
-	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.000.000	19.000.000	95.573.000	188.558.000	-	2.925.000	17.575.500	9.131.400	186.505.000	-	48,75	92,50	9,55	99,97	-	1,53	2370
-	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan kantor	-	-	18.080.000	12.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	27,65	41,66	-	67	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan		-	-	1.674.464	-	-	-	-	1.673.800	-	-	-	-	99,96	-	-	0	0
-	Penyusunan laporan	-	-	1.674.464	-	-	-	-	1.673.800	-	-	-	-	99,96	-	-	0	0

Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD																		
Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	305.721.100	179.972.315	272.540.000	-	-	288.479.400	170.738.199	163.862.062	-	-	94,36	94,86	60,12	-	-	0	0	
- Pendidikan dan pelatihan Formal	305.721.100	179.972.315	272.540.000	-	-	288.479.400	170.738.199	163.862.062	-	-	94,36	94,86	60,12	-	-	0	0	
Program pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	3.580.572.400	70.158.000	185.073.052	2.264.270.760	-	3.476.049.694	42.382.560	0	2.242.122.700	-	97,08	60,41	0	99,02	-	0	0	
- Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dengan masyarakat	123.527.400	46.900.000	-	64.270.760	-	111.939.800	22.607.400	0	46.093.700	-	90,61	48,20	0	71,71	-	0	0	
- Pembangunan Infrastruktur jaringan Internet radio	-	-	-	2.200.000.000	-	-	-	-	2.196.029.000	-	-	-	99,81	99,81	-	0	0	

link																		
- Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	3.457.045.000	-	-	-	-	-	3.364.109.894	-	-	-	-	97,31	-	-	-	-	0	0
- Penguasaan Alat Studio dan Komunikasi	-	-	185.073.052	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Program Kerjasama Informasi dan mass media	-	30.460.000	9.596.668	150.000.000	-	-	23.759.900	-	-	134.318.805	-	-	78,00	0	89,54	-	0	0
- Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	30.460.000	-	-	-	-	23.759.900	-	-	-	-	-	78,00	0	-	-	0	0
- Penyusunan Dokumentasi dan Informasi	-	-	9.596.668	150.000.000	-	-	-	0	-	134.318.850	-	-	79,00	-	89,54	-	0	0
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	-	79.373.311	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
- Pengu	-	-	79.373.311	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

rusan Hak izin/ hak siar radio																		
Program pengembangan dan implementasi E-Government	-	1.566.800,000	-	10.200.000	-	-	1.314.307,280	-	0	-	-	83,88	-	0	-	0	0	
- Pembuatan Comm and Center	-	280.000.000	-	-	-	-	274.585,000	-	-	-	-	98,06	-	-	-	0	0	
- Penyediaan peralatan/perengkapan gedung kantor	-	988.800.000	-	10.200.000	-	-	754.212,280	-	0	-	-	76,43	-	0	-	0	0	
- Pengadaan server storage	-	300.000.000	-	-	-	-	285.510,000	-	-	-	-	95,17	-	-	-	0	0	
Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten	-	-	-	-	4.213,636,299					3,931,248,063	-	-	-	-	83,29	0	0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.989,122,795					2,664,467,109	-	-	-	-	89,73	0	0	
- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	-	2.969,122,795					2,664,467,109	-	-	-	-	89,73	0	0	

Administrasi Umum perangkat daerah	-	-	-	-	250.774.193					156.104.962	-	-	-	-	62.24	0	0
- Penyelesaian Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	-	5.575.841	-	-	-	-	4.630.000	-	-	-	-	83.03	0	0
- Penyelesaian peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	28.937.640	-	-	-	-	25.414.300	-	-	-	-	87.82	0	0
- Penyelesaian peralatan rumah tangga	-	-	-	-	9.755.260	-	-	-	-	6.583.000	-	-	-	-	67.48	0	0
- Penyelesaian bahan logistik — kantor	-	-	-	-	72.831.800	-	-	-	-	37.834.050	-	-	-	-	51.94	0	0
- Penyelesaian barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	-	15.945.852	-	-	-	-	15.089.600	-	-	-	-	94.63	0	0
- Penyelesaian	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

	bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan																	
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	-	-	117.728.000	-	-	-	-	66.554.012	-	-	-	-	66.554.012	0	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-	-	-	-	141.773.874	-	-	-	-	136.21	-	-	-	-	97.48	0	0
-	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	-	-	-	-	120.500.000	-	-	-	-	118.950.000	-	-	-	-	97.05	0	0
-	Pengadaan kendaraan dinas operasional	-	-	-	-	21.273.874	-	-	-	-	21.260.000	-	-	-	-	99.93	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	387.945.437	-	-	-	-	358.021.130	-	-	-	-	92.28	0	0
-	Penyediaan Jasa surat	-	-	-	-	5.129.340	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0

menyurat																		
- Penye- daan Jasa komun- ikasi, sumbe- r daya air dan listrik	-	-	-	-	28.959 .912	-	-	-	-	20.2 52.6 30	-	-	-	-	-	69 .9 3	0	0
- Penye- daan Jasa Pelay- anan umum kantor	-	-	-	-	353.85 6.185	-	-	-	-	337. 768 500	-	-	-	-	-	95 .4 5	0	0
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-	-	-	-	464.02 0.000	-	-	-	-	458 339. 900	-	-	-	-	-	98 .7 7	0	0
- Penye- daan jasa Pemeli- haraan, biaya pemeli- haraan, pajak dan perizin- an kendera- aan dinas opera- sional atau lapang- an	-	-	-	-	89.140 .000	-	-	-	-	85.5 23.9 00	-	-	-	-	-	95 .9 4	0	0
- Pemeli	-	-	-	-	24.880	-	-	-	-	24.8	-	-	-	-	-	10	0	0

iharaan peralatan dan mesin lainnya					000					80.000					0		
- Pemeliharaan aset tetap lainnya	-	-	-	-	350.000.000	-	-	-	-	347.930.000	-	-	-	-	99.400	0	0
Program Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	-	363.860.143	-	-	-	-	331.823.624	-	-	-	-	91.199	0	0
Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	363.860.143	-	-	-	-	331.823.624	-	-	-	-	91.199	0	0
- Pelayanan informasi publik	-	-	-	-	318.524.617	-	-	-	-	295.002.700	-	-	-	-	92.811	0	0
- Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	-	-	-	-	45.335.526	-	-	-	-	36.820.924	-	-	-	-	81.211	0	0
Program Aplikasi Informatika	-	-	-	-	1.817.480.317	-	-	-	-	1.812.422.000	-	-	-	-	99.722	0	0

Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	1.817.480.317	-	-	-	-	1.812.422.000	-	-	-	-	99,72	0	0
- Pengelolaan Pusat data Pemerintah daerah	-	-	-	-	1.817.480.317	-	-	-	-	1.812.422.000	-	-	-	-	99,72	0	0

Pada tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 5.840.556.500,00 untuk melaksanakan 4 program dan 15 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp.5.394.116.00 atau 92,36. Keempat program yang dalam pelaksanaannya realisasinya di atas 90 % ,disebabkan Dinas Komunikasi dan Informatika masih baru Terbentuk pada tahun 2017 sehingga masih membutuhkan alokasi anggaran yang sangat banyak.

Pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.7.839.899.220,00 untuk melaksanakan 5 program dan 20 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp.7.684.832.051,96 atau 98,02 %.

Pada tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar mendapatkan pagu anggaran sebesar 6.899.371.000,00 untuk melaksanakan 5 program dan 20 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.546.145.180,76.

Pada tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.8.559.797.674,00 Untuk melaksanakan 5 program dan 17 kegiatan. Pagu anggaran ini lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Bencana pandemi Covid-19 yang melanda Kota Pematang Siantar dan hampir seluruh daerah di Indonesia mengakibatkan adanya refocusing anggaran yang diprioritaskan untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Realisasi anggaran sebesar 7.667.472.895 atau 92,58%. Akan Tetapi Dinas Komunikasi pada tahun 2020 mendapatkan Dana Insentif Daerah sebesar Rp.2.200.000.000,00 yang bertujuan untuk membantu ekonomi rakyat. Tahun 2021 merupakan tahun awal penerapan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Melalui peraturan ini, sudah tidak ada lagi klasifikasi belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Selain itu, perencanaan tahun 2021 juga merupakan awal dimulainya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pada tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar mendapatkan pagu anggaran sebesar 6.394.976.759 dan Realisasi Anggaran sebesar 5.919.382.725atau 87,44. Pagu tahun 2021 tidak dapat diperbandingkan karena telah terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar secara umum dikatakan sudah memenuhi harapan masyarakat, namun seiring dengan perubahan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks, hal ini tentunya berimplikasi pada perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin canggih, kemajuan tersebut harus mampu direspon oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar. Namun permasalahan dan kendala kerap dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar dalam upaya memenuhi pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan responsive. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyelaraskan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Pematang Siantar.

Kemampuan itu haruslah berorientasi pada pelayanan informasi yang memuaskan dengan secara terus menerus merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat atau publik dengan menghadirkan program dan kegiatan yang efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar apa yang diharapkan masyarakat atau publik akan pelayanan informasi yang cepat dan tepat.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar dalam upaya mengoptimalkan pelayanan antara lain :

1. Masih kurangnya regulasi/kebijakan tentang penyelenggaraan SPBE.
2. Kurangnya ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK, kemampuan ASN dalam mengolah konten untuk informasi publik dan pengolahan data statistik sektoral dibawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan SPBE dan pendukung alat peliputan dalam mendukung pengelolaan informasi publik.
4. Belum Terselenggaranya otoritas statistik sektoral.
5. Belum Optimalnya Sikap proaktif masyarakat terhadap pengembangan dan pemberdayaan TIK.
6. Masih Belum optimalnya penerapan Sistem Keamanan Informasi di pemerintah kota.

Selain tantangan yang ada, terdapat juga peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar dalam upaya pengembangan pelayanan antara lain :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar sebagai Pusat Data (Data Center) dalam pengelolaan Teknologi Informasi di Kota Pematang Siantar.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai konsultan perencanaan di bidang komunikasi dan informasi bagi seluruh OPD.
3. Tersedianya jaringan komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar sebagai modal utama dalam percepatan arus pertukaran dan desiminasi informasi antar OPD.
4. Tersedianya Command Center sebagai Pusat Informasi.
5. Berkembangnya penggunaan Teknologi informasi dan komunikasi dalam usaha ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan daya saing perekonomian di Kota Pematang Siantar.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota pematang Siantar telah memiliki akses Pelintas (CCTV untuk memantau Arus Lalu Lintas dibeberapa titik)
7. Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pematang Siantar menyediakan WIFI Publik di ruang terbuka umum, di rumah ibadah dan diberbagai Tempat pendidikan.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar Juga telah memiliki Master Plan Penyelenggaraan SPBE untuk acuan atau tolak ukur dalam menentukan arah kebijakan dalam penyelenggaraan SPBE.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar Juga telah memiliki Master Plan Smart City sebagai tolak ukur dalam pengembangan kota cerdas di Kota Pematang Siantar.

Upaya dalam merealisasikan harapan dan peluang tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan kemampuan SDM yang handal dan kompeten dibidang TIK. Selain itu dukungan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sangatlah dibutuhkan, antara lain Ketersediaan internet (bandwith) untuk seluruh OPD sampai ke kelurahan dan puskesmas serta sekolah, sarana dan prasarana pendukung peliputan, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan SPBE, sarana dan prasarana Pendukung smart city, media sebagai sarana percepatan penyebaran informasi publik, sarana prasarana Pendukung keamanan Informasi dan

kebutuhan sarana prasarana yang representative yang digunakan untuk penunjang aktifitas maupun pemanfaatan dan penggunaan teknologi dan pemanfaatan intranet.

Untuk itu perlu dilakukan upaya pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan sistem aplikasi dalam satu network operating center guna peningkatan pelayanan publik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian permasalahan pembangunan sekarang dan ke depan dengan mengacu pada RPJMD Kota Pematang Siantar dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada bab ini terdapat isu-isu bersifat strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dalam pelaksanaan tugas jangka menengah ke depan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.

Berikut disajikan Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar dalam tabel.3.1.

Tabel.3.1

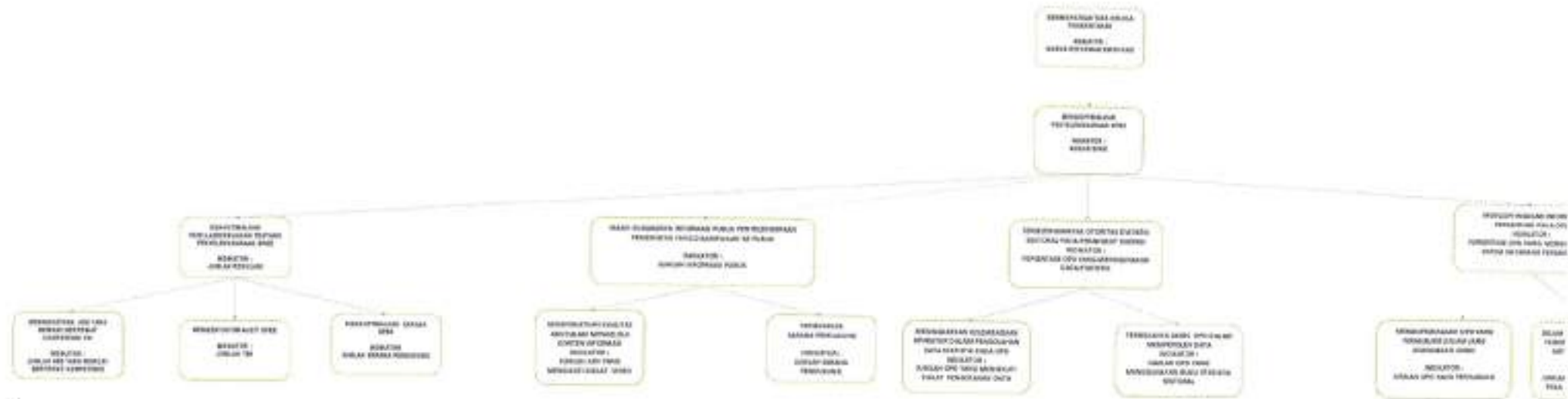
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya informasi dan komunikasi tentang penyelenggaraan dan	Informasi pembangunan masih belum tersampaikan	Kegiatan, program kerja dan proses pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan masih belum terinformasikan dengan optimal

	kebijakan pemerintahan.	kepada masyarakat	kepada masyarakat.
		Belum Optimalnya informasi dan komunikasi pemerintahan	Kurangnya SDM ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK dibawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika.
			Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk mengelola informasi, persandian serta pendukung SPBE
			Belum Optimalnya Kinerja PPID dalam penyajian data dan informasi publik di setiap OPD
	Belum Efektif dan efisiennya sisitem Pemerintahan	Penilaian Indeks SPBE masih kurang	Infrastruktur jaringan TIK belum terkoneksi sampai puskesmas dan upt, serta di setiap kelurahan dan sekolah.
			Belum tersedianya proses bisnis Pemerintah Kota Pematangsiantar
			Masih belum dilaksanakannya audit TIK (infrastruktur, sarana prasarana, aplikasi dan keamanan) yang dilakukan oleh Tim Audit (inspektorat atau auditor)
			Belum terselenggaranya Online single submission (OSS)
			Belum diterapkannya manajemen SPBE (manajemen data, manajemen resiko, manajemen layanan SPBE, manajemen Pengetahuan, manajemen perubahan)
		Tingkat Keamanan Informasi masih belum diterapkan di Pemerintahan	Masih kurangnya regulasi/ kebijakan tentang keamanan informasi.
			Belum diterapkannya sistem manajemen keamanan informasi di pemerintahan Kota
			Tugas dan Fungsi persandian belum ada yang menggantikan ASN yang telah purnabakti
3.	Keterbukaan informasi publik	Isu-isu yang berkembang dimasyarakat serta pemberitaan	Belum Optimalnya information center sebagai pusat pemberitaan pemerintahan Kota Pematang Siantar

		hoax yang tersebar dimasyarakat	
			Diperlukannya media sebagai pusat penyebaran informasi
			Belum Optimalnya Informasi Statistik Sektoral yang dapat diakses oleh masyarakat maupun OPD (satu data)
			Masih Kurangnya kesadaran OPD dalam menyediakan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi public
			Tidak memiliki control atau pengawasan atas informasi yang berkembang dimasyarakat
4.	Penyelenggaraan Smart City	Penyelenggaraan Smart City Belum Optimal	Belum adanya anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan smart city
			Kurang optimalnya koordinasi Dewan smart city dan tim pelaksana smart city
			Belum adanya regulasi/kebijakan yang menaungi Penyelenggaraan Smart city.

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR



3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penetapan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pematangsiantar Tahun 2022-2027 tidak dapat dipisahkan dari visi pembangunan Jangka Panjang yang telah tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2005-2025. Dengan pertimbangan pertimbangan arah pembangunan, kondisi, masalah, tantangan, dan isu-isu strategis, maka Visi Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 adalah " *Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*" Dalam visi tersebut memuat pokok visi yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun kedepan penjabaran pokok pokok visi sebagai berikut :

Penjelasan Visi

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kota Pematangsiantar sehat, sejahtera dan berkualitas	Sehat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau pasca pandemic Covid-19.
	Sejahtera	Meningkatkan perlindungan masyarakat dan social ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat, dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses inventasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industry, khususnya masa dan atau pasca pandemic Covid-19
	Berkualitas	Meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan Pengelolaan Sumber daya Alam

		yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsive serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai sub pusat perdagangan regional Sumatera Utara bagi hinterland.
--	--	---

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kota pematangsiantar yang telah ditetapkan, maka misi Pembangunan Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut :

- **Misi 1** adalah menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais, dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas.
- **Misi 2** adalah Menguatkan dan memulihkan perekonomian Regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan Koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemic dan atau pasca pandemic Covid-19.
- **Misi 3** adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperate governance.
- **Misi 4** adalah Menguatkan sentralisasi dan daya tarik kota, guna pencapaian siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di provinsi sumatera utara.
- **Misi 5** adalah Mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Berdasarkan misi diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah bidang urusan komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandiaan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung **Misi 3** yaitu **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperate governance.**

Berkaitan dengan dengan Visi dan Misi Pembangunan daerah maka Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting untuk mendukung pencapaian visi dan misi selama lima tahun kedepan dengan Mengacu pada Misi ke 3 dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang urusan komunikasi dan informatika, urusan bidang statistik dan urusan bidang persandian, dengan mensinkronisasikan dengan visi dan misi dan prioritas pembangunan daerah Kota Pematangsiantar, maka yang merupakan penjabaran program kepala daerah, yang mendukung Program kerja Prioritas tersebut adalah **Program Aplikasi Informatika**.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Visi/Misi/Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Visi : Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas				
	Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>cooperate governance</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi pembangunan masih belum tersampaikan kepada masyarakat 2. Belum Optimalnya informasi dan komunikasi pemerintahan. 3. Penilaian Indeks SPBE masih kurang. 4. Tingkat Keamanan Informasi masih belum diterapkan di Pemerintahan. 5. Isu-isu yang berkembang dimasyarakat serta pemberitaan hoax yang tersebar dimasyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan, program kerja dan proses pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan masih belum terinformasikan dengan optimal kepada masyarakat. 2. Kurangnya SDM ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK dibawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika. 3. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah tersedianya akses penyampai informasi (website). 2. Hampir seluruh kalangan masyarakat sudah memiliki smartphone sebagai sarana penerima informasi. 3. Adanya regulasi terkait implementasi E-Government 4. Dukungan Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan Komitmen para kepala

		<p>6. Belum Optimalnya penyelenggara an smart city.</p>	<p>mengelola informasi, persandian serta pendukung SPBE.</p> <p>4. Komitmen ASN masih rendah dalam pelaksanaan tupoksi.</p> <p>5. Masih belum dilaksanakannya audit TIK (infrastruktur, sarana prasarana, aplikasi dan keamanan) yang dilakukan oleh Tim Audit (inspektorat atau auditor).</p> <p>6. Masih kurangnya regulasi/ kebijakan tentang keamanan informasi.</p> <p>7. Belum diterapkannya manajemen SPBE (manajemen data, manajemen resiko, manajemen layanan SPBE, manajemen Pengetahuan, manajemen perubahan).</p> <p>8. Belum diterapkannya sistem manajemen keamanan informasi di pemerintahan Kota.</p>	<p>OPD.</p> <p>5. Tersedianya master plan Penyelenggara an smart city.</p> <p>6. Tersedianya master plan Penyelenggara an SPBE.</p> <p>7. Tersedianya wifi publik diruang terbuka, rumah ibadah dan tempat perkuliahan.</p> <p>8. Tersedianya CCTV Pelintas.</p> <p>9.</p>
--	--	---	---	--

			<p>9. Tugas dan Fungsi persandian belum ada yang menggantikan ASN yang telah purnabakti.</p> <p>10. Tidak adanya information center sebagai pusat pemberitaan pemerintahan Kota Pematang Siantar.</p> <p>11. Belum Tersedianya Informasi Statistik Sektoral yang dapat diakses oleh masyarakat maupun OPD (satu data).</p> <p>12. Masih Kurangnya kesadaran OPD dalam menyediakan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi public.</p> <p>13. Tidak memiliki control atau pengawasan atas informasi yang berkembang dimasyarakat.</p> <p>14. Belum adanya anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan smart city.</p> <p>15. Kurang optimalnya koordinasi Dewan smart</p>	
--	--	--	--	--

			<p>city dan tim pelaksana smart city.</p> <p>16. Belum adanya regulasi/kebijakan yang menaungi Penyelenggaraan Smart city.</p> <p>17. Belum tercovernya media berbayar sebagai percepatan penyebaran informasi publik.</p> <p>18. Belum adanya proses bisnis Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam Penyelenggaraan SPBE.</p>	
--	--	--	--	--

Mengingat eratnya kaitan antara Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar dengan Dokumen RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar, berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar, yaitu sebagai OPD yang menyelenggarakan urusan Bidang Komunikasi dan Informasi, Urusan Bidang Statistik, Urusan Bidang Persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar untuk tahun 2022-2027 mendukung visi dan misi Wali Kota

Pematang Siantar, terutama pada misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *corporate governance*. Pada misi ini terdapat satu tujuan, yaitu mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan. Untuk tujuan ini ada 3 sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja : a. Indeks Kepuasan Masyarakat, b. Indeks SPBE; 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja : a. Nilai SAKIP, b. Indeks IPKD; 3. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dengan indikator kinerja : Derajat Desentralisasi Fiskal.

Dari ketiga sasaran RPJMD Kota Pematang Siantar di atas, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pematang Siantar mendukung dua sasaran satu, *meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik* dan *Meningkatnya akuntabilitas Kinerja OPD* dengan indikator kinerja Nilai Indeks SPBE oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya, Indeks Keamanan Informasi, Indeks Pembangunan Statistik, Indeks Smart City, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai Akip OPD, Inovasi Perangkat Daerah. Sasaran kedua , *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD* dengan indikator, Nilai AKIP OPD dan Inovasi Perangkat Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022- 2024, Visi Kementerian Kominfo RI untuk tahun 2022-2024 selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu : Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong. Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai Tujuan Kementerian Kominfo RI memetakan Arah Pembangunan Nasional kedalam 3 (tiga) tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika antara lain :

- Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.
- Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.
- Mendorong percepatan informasi digital di 3 aspek bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital.

Adapun Sasaran Strategis Kemenkominfo untuk tahun 2022-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Cakupan jaringan Pita lebar yang cepat dan terjangkau.

2. Meningkatnya pemanfaatan TIK disektor Ekonomi dan Bisnis.
3. Terwujudnya Masyarakat yang cerdas digital.
4. Dukungan Implementasi digitalisasi pemerintah.
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik.

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pematang Siantar terhadap Sasaran Renstra K/L

NO	Sasaran Renstra Kemenkominfo	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Kementerian Kominfo				
1.	Meningkatnya Cakupan Jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Akses internet belum seluruhnya Fiber optic	Dibutuhkannya dana yang besar dalam pembangunan jaringan FO	Adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam pengoptimalan jaringan FO
2.	Meningkatnya pemanfaatan TIK disektor Ekonomi dan bisnis	Kurangmya sosialisasi IT bidang Komunikasi dan informatika dengan sasarannya masyarakat atau komunitas	Teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang masih baru dalam dinamika masyarakat	Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan TIK mulai berkembang
3.	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Terbatasnya sarana pembelajaran TIK bagi Masyarakat	Belum optimalnya fasilitas internet gratis diruang public	Hampir seluruh kalangan masyarkat sudah memiliki smartphone
4.	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	Penyelenggraan SPBE belum optimal	Masih kurangnya Bimtek Kompetensi dibidang TIK	Adanya regulasi terkait implementasi E-Government
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan	Tersedianya media akses untuk	Kurangnya SDM ASN dibidang TIK serta sarana	Sudah tersedianya akses

	informasi dan komunikasi publik.	penyampaian informasi	pendukung	penyampai informasi (website)
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE	Belum optimalnya regulasi/kebijakan tentang penyelenggaraan SPB, sarana prasarana pendukung SPBE	Adanya komitmen bersama antar OPD dalam penyelenggaraan SPBE

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat sumatera utara. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, mk Visi tahun 2018-2023 yaitu : Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.

Sejalan dengan itu Misi yang memiliki keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Adalah adalah Misi Kedua yaitu : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis. Melalui Misi II, Dinas Kominfo provinsi Sumatera Utara dapat mewujudkan dengan :

1. Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
2. Meningkatkan pengeolaan Aplikasi.
3. Penyelenggaraan Statistik Sektor dilingkup Provinsi.
4. Meningkatkan Pengelolaan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Inforamtika Kota Pematang Siantar terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

NO	Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara				
1.	Meningkatnya penyediaan dan	Kurangnya ASN yang	Kurangnya ASN yang berkompetensi	Sudah tersedianya

	pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	berkompetensi TIK dan sarana pendukung	TIK dan sarana pendukung	akses penyampai informasi
2.	Meningkatkan pengeolaan Aplikasi	Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE	Belum optimalnya regulasi/kebijakan tentang penyelenggaraan SPB, sarana prasarana pendukung SPBE	Adanya komitmen bersama antar OPD dalam penyelenggaraan SPBE
3.	Penyelenggaraan Statistik Sektor dilingkup Provinsi.	Belum optimalnya penyelenggaraan statistic sektoral	Kurangnya ASN yang berkompetensi dibidang Statiastik	Layanan Open data telah tersedia dalam bentuk list data
4.	Meningkatkan Pengelolaan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.	Belum diterapkannya keamanan informasi daerah	Kurangnya ASN yang berkompetensi di Bidang TIK	Salah satu keamanan informasi yang akan dilaksanakannya tanda tangan elektronik

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang merupakan salah satu isu strategis dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2022-2027. Pada saat ini Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2023 sedang dilakukan revisi RTRW. Sebagai dokumen perencanaan ditingkat OPD, Penyusunan Renstra kominfo harus mempedomani RTRW Kota Pematang Siantar. Perencanaan Tata Ruang meliputi rencana umum dan rinci tata ruang, dalam menjalankan program yang dilaksanakan dalam mendukung Misi 3 yaitu **"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperate governance."** Penyelarasan dokumen Renstra OPD dengan RTRW bertujuan agar terwujudnya keselarasan antara perencanaan strategis pada dokumen renstra.

1. Berbagai potensi kegiatan ekonomi, social budaya dan keagamaan serta pemerintahan dengan pelayanan skala wilayah dan nasional sudah berlangsung sejak dahulu :

- a. Kegiatan perdagangan dan jasa komersial perbankan, supermarket, telekomunikasi, dan pelayanan imigrasi yang memiliki jangkauan pelayanan regional.

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar terhadap Sasaran RTRW Kota Pematang Siantar

NO	Sasaran RTRW	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1.	Tersedianya informasi tentang kebijakan pemerintah daerah	Masih belum optimalnya informasi tentang Pemerintah Kota Pematang Siantar	Kurangnya SDM ASN dibidang TIK serta sarana pendukung	Sudah tersedianya akses penyampai informasi (website)

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penelaahan KLHS dan RPJMD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dalam penyusunan RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018

ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2022-2027, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Berikut isu-isu prioritas hasil KLHS RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022- 2027, sebagai berikut:

1. Penataan Ruang
2. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Pengelolaan Keluarga Sehat
4. Pengelolaan Pelayanan Masyarakat
5. Pertumbuhan Ekonomi Kota
6. Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam
7. Pematapan Tata Kelola Pemerintahan.

3.6. Penentuan Isu Strategis dikaitkan dengan Masalah Masalah pelayanan Perangkat Daerah.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus dikedepankan atau diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang Perangkat daerah dimasa yang akan datang. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi perangkat daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Penentuan Isu-isu strategis tidak terlepas dari fungsi Dinas Komunikasi dan informatika yang melaksanakan fungsi teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistic, dan bidang persandian.

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Komunikasi dan informatika Kota Pematangsiantar ditemukan beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2022-2027.

Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eskternal termasuk per masalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu :

1. Kegiatan, program kerja dan proses pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan masih belum terinformasikan dengan optimal kepada masyarakat.
2. Kurangnya SDM ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK dibawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk mengelola informasi, persandian serta pendukung SPBE.
4. Infrastruktur jaringan TIK belum terkoneksi sampai puskesmas dan upt, serta di setiap kelurahan dan beberapa OPD masih menggunakan Infrastruktur jaringan radio link.
5. Komitmen ASN masih rendah dalam pelaksanaan tupoksi.
6. Belum adanya proses bisnis Pemerintah Kota Pematang Siantar dalam penyelenggaraan SPBE.
7. Masih belum dilaksanakannya audit TIK (infrastruktur, sarana prasarana, aplikasi dan keamanan) yang dilakukan oleh Tim Audit (inspektorat atau auditor).
8. Belum diterapkannya manajemen SPBE (manajemen data, manajemen resiko, manajemen layanan SPBE, manajemen Pengetahuan, manajemen perubahan).
9. Masih kurangnya regulasi/ kebijakan tentang keamanan informasi.
10. Belum diterapkannya sistem manajemen keamanan informasi di pemerintahan Kota.
11. Tugas dan Fungsi persandian belum ada yang menggantikan ASN yang telah purnabakti.
12. Tidak adanya information center sebagai pusat pemberitaan pemerintahan Kota Pematang Siantar.
13. Belum Tersedianya Informasi Statistik Sektorl yang dapat diakses oleh masyarakat maupun OPD (satu data).
14. Masih Kurangnya kesadaran OPD dalam menyediakan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi public.
15. Tidak memiliki control atau pengawasan atas informasi yang berkembang dimasyarakat.
16. Belum tercovernya seluruh media berbayar dalam percepatan Penyebaran Informasi.

17. Belum tercovernya media berbayar sebagai percepatan penyebaran informasi publik.
18. Belum adanya anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan smart city.
19. Kurang optimalnya koordinasi Dewan smart city dan tim pelaksana smart city.
20. Belum adanya regulasi/kebijakan yang menaungi Penyelenggaraan Smart city.
21. Belum adanya proses bisnis Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam Penyelenggaraan SPBE.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Untuk mewujudkan Visi Kota pematangsiantar Tahun 2022-2027 yaitu * **Mewujudkan Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas**". Dan Misi 3 yaitu : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance**. Maka upaya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Ke-3 ini dalam urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian ditetapkan Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027 adalah : **Mewujudkan Reformasi tata kelola Pemerintahan**. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Sasaran Jangka Menengah Periode tahun 2022-2027 yang akan dicapai adalah: **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

Tujuan dan sasaran jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar beserta indikator kinerja disajikan dalam table berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>coorporate governance</i> .	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks SPBE	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks SPBE
									Indeks Pembangunan Statistik
									Indeks Keterbukaan Informasi Publik

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
									Indeks Kepuasan Masyarakat
									Indeks KAMI
									Indeks Smart City
								Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
									Inovasi Perangkat daerah

Tabel TC-25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan (PD)	Sasaran (PD)	Indikator Tujuan/Sasaran (PD)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun Ke-				
				2023	2024	2025	2026	2027
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang efektif dan efisien dan akuntabel		Indikator SPBE	2,854	2,994	3,187	3,409	3,563
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks SPBE	2,854	2,994	3,187	3,409	3,563
			Indeks Pembangunan Statistik	n/a	2	2	3	3
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Informatif (90)	Informatif (90)	Informatif (90)	Informatif (90)
			Indeks KAMI	100 % (skor indeks Kami 133)	100 % (skor indeks kami 208)	100 % (skor indeks Kami 270)	100 % (skor Indeks kami 408)	100 % (skor Indeks kami 505)
			indeks Smart City	n/a	n/a	0,8	1,0	1,2
			Indeks Kepuasan masyarakat	80	80	80	85	85
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	CC	B	B	B	B
			Inovasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar mencapai tujuan dan sasaran renstranya serta mendukung pencapaian RPJMD dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 didasarkan pada analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL 	
---	--

			Government dalam seluruh siklus manajemen pemerintahan		daerah.
O2	Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kemudahan akses terhadap teknologi dan informasi	S2, dengan O2	Mengoptimalkan akses media yang tersedia dalam menyampaikan informasi	W1 dengan O2	Meningkatkan kompetensi SDM dan pemanfaatan sarpras dalam penguasaan teknologi
O3	Masih adanya partisipasi masyarakat dalam peningkatan layanan dan informasi publik	S1 dengan O3	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan layanan dan informasi publik	W2, W3 dengan O4	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik
O4	Kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintah	S2,S3, dengan O4	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam proses dokumentasi dan informasi	W1 dengan O3	Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat
Threats (T)			S-T		W-T

T1	Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat, kritis dan beragam	S1 dengan T1	Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan tentang layanan dan informasi publik	W1 dengan T1	Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan masyarakat
T2	Kemampuan penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat	S2, dengan T2	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan sarpras untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi	W1, W2 dengan T2	Mengoptimalkan kompetensi SDM.

Untuk merumuskan Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dengan analisis logik berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah dikemukakan yang dikaitkan dengan target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan Perangkat Daerah, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar selama 5 tahun.

Strategi dan Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang yaitu Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang dikaitkan dengan Kebijakan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2020-2027. Strategi dan Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dalam 5 (lima) tahun mendatang tercantum dalam Tabel.TC-26 berikut ini :

Tabel TC-26
Tujuan, Sasaran , Strategi dan Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi Mewujudkan Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas			
Misi 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan Penyelenggaraan SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan regulasi/kebijakan tentang penyelenggaraan SPBE. 2. Adanya diklat Kompetensi bagi ASN dibidang TIK. 3. Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung Penyelenggaraan

			<p>SPBE. Persandian dan sarana Prasarana Komunikasi dan informasi lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan internet bagi OPD Mengoptimalkan pengembangan dan integrasi aplikasi Mengoptimalkan pengelolaan pusat data. Menyediakan wifi publik diberbagai lokasi. Tersedianay CCTV Pelintas diberbagai titik
		Mengoptimalkan Keterbukaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan media berbayar dalam percepatan penyebaran informasi Mengoptimalkan informasi publik lewat website dan media sosial Koordinasi antar OPD terkait program kebijakan OPD
		Mengoptimalkan Pembangunan Statistik	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan koordinasi OPD terkait pengolahan data.

			2. Mengoptimalkan Koordinasi kepada instansi Pembina
		Mengoptimalkan Penyelenggaraan Smart City	<p>1. Mengakomodir anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan smart city.</p> <p>2. Mengoptimalkan koordinasi Dewan smart city dan tim pelaksana smart city.</p> <p>3. Menyusun regulasi/kebijakan yang menaungi Penyelenggaraan Smart city.</p>
		Mengoptimalkan Keamanan Informasi	<p>1. Membuat Regulasi terkait keamanan informasi.</p> <p>2. Koordinasi ke Pemerintah Pusat terkait Tanda Tangan elektronik</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran 5 tahunan dalam rangka mencapai visi dan misi dan tujuan yang akan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka panjang daerah Kota Pematangsiantar serta perwujudan dari visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pada dasarnya Rencana Strategis Tahun 2022-2027 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama waktu 5 tahun.

Target Kinerja merepresentasikan keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif dari semua indikator kinerja. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Sementara itu untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar melalui indikator keberhasilan Program dan kegiatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar menyusun rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan tabel 2.7 sebagai berikut :

	Pengadaan Perakitan Rumah Tempa	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tempa yang disediakan	Paket	4	4	11.000.000	4	11.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	20	110.000.000	Dinas Kominfo
	Pengadaan Bahan Lajuh Kantor	Jumlah Paket Bahan Lajuh Kantor yang disediakan	Paket	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	20	200.000.000	Dinas Kominfo
	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	20	120.000.000	Dinas Kominfo
	Pengadaan Bahan kepan dan Perakitan perantara g-urungan	Jumlah bahan kepan dan Perakitan perantara g-urungan yang disediakan	Cetakan	1	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	5	500.000.000	Dinas Kominfo
	Freelance Kumpulan Tama	Jumlah Laporan Freelance Kumpulan Tama	Laporan	10	0	0	1	10.000.000	0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	0	40.000.000	Dinas Kominfo
	Pengembangan Rapi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengembangan Rapi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	100	100.000.000	50	150.000.000	50	100.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	100	800.000.000	Dinas Kominfo
	Produksi dan Alokasi Dokumen pada SKPD	Jumlah Dokumen Produksi dan Alokasi Dokumen pada SKPD	Dokumen	10	10	50.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	50	100.000.000	Dinas Kominfo
	Pengadaan Barang MB, Daring Penunjang Sistem Perakitan dan Daring	Cekupan Barang penunjang Perangkat Daring	Perangkat	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	1.010.000.000	Dinas Kominfo
	Pengadaan Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	1	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Dinas Kominfo
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	1	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	80.000.000	Dinas Kominfo
	Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang disediakan	Paket	2	0	0	1	30.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	300.000.000	Dinas Kominfo
	Pengadaan Perakitan dan Meja Lainnya	Jumlah Unit Perakitan dan Meja Lainnya yang disediakan	Unit	10	20	200.000.000	10	20.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	70	500.000.000	Dinas Kominfo
	Pengadaan Asat Tanya Lainnya	Jumlah Unit Asat Tanya Lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	10	100.000.000	0	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	40	500.000.000	Dinas Kominfo
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perakitan Gedung Kantor atau Gedung Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perakitan Gedung Kantor atau Gedung Lainnya yang disediakan	Unit	1	0	0	10	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	10	100.000.000	Dinas Kominfo
	Pengadaan Jasa Penunjang Sistem Perakitan Daring	Cekupan Barang penunjang Perangkat Daring	Perangkat	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	1.010.000.000	Dinas Kominfo
	Pengadaan Jasa Sistem Integrasi	Jumlah Laporan Pengembangan Jasa Sistem Integrasi	Laporan	0	4	0.000.000	4	0.000.000	4	0.000.000	4	0.000.000	4	0.000.000	20	20.000.000	Dinas Kominfo
	Pengadaan Jasa Komputasi dan Daya Ar dan Listrik	Jumlah Laporan Pengembangan Jasa Komputasi, Sumber Daya Ar dan Listrik yang disediakan	Laporan	24	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	60	300.000.000	Dinas Kominfo

		PROGRAM PENYELENGGAAN PERSANDUAN UNTUK PONDOKAN BENCANA	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	Persentase		0%	100 (Skor 125)	56.888.416	100 (Skor 200)	56.888.706	100 (Skor 275)	81.134.300	100 (Skor 400)	87.765.737	100 (Skor 500)	92.262.730	100 (Skor 500)	265.768.157	Dikembangkan
		Pengembangan Persediaan untuk Pengiriman Informasi Pemerintah Daerah KabupatenKota	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	Indeks		0	125	56.888.416	200	56.888.706	275	81.134.300	400	87.765.737	500	92.262.730	500	265.768.157	Dikembangkan
		Kontak Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunitas Band Pemerintah Daerah KabupatenKota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunitas Band Pemerintah Daerah KabupatenKota yang Ditayangkan	Daerah		1	1	56.888.416	1	41.586.706	1	42.134.300	1	42.785.737	1	43.282.730	1	202.768.157	Dikembangkan
		Pelaksanaan Kajian Kebijakan dan Pengelompokan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah KabupatenKota	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan dan Pengelompokan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah KabupatenKota	Laporan		0	0	0	0	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	15.000.000	Dikembangkan
		Pelaksanaan Kelembagaan Informasi Pemerintahan KabupatenKota Berbasis Elektronik dan (Man) Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kelembagaan Informasi Pemerintahan KabupatenKota Berbasis Elektronik dan Man Elektronik	Laporan		0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	1	5.000.000	0	15.000.000	Dikembangkan
		Pengembangan Layanan Kelembagaan Informasi Pemerintah Daerah KabupatenKota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Mengembangkan Layanan Kelembagaan Informasi	OPD		0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	20.000.000	Dikembangkan
		Pengembangan Pola Kelembagaan Informasi Pemerintah Daerah KabupatenKota	Jumlah OPD yang mengembangkan pola kelembagaan informasi variabel untuk perangkat daerah	OPD		0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	0	15.000.000	Dikembangkan
		Operasionalisasi Jaring Komunitas Band Pemerintah KabupatenKota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunitas Band	OPD		0	0	0	0	0	0	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	0	15.000.000	Dikembangkan
							Total	11.418.915.461		11.324.187.858		11.845.122.730		11.784.825.119		11.881.375.724		42.455.194.187	Dikembangkan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 01 Tahun 2021 Tentang perubahan Atas peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 tahun 2017 Tentang kedudukan, susunan oraganisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Dinas Daerah Kota pematangsiantar. Serta Berdasarkan Peraturan daerah Kota Pematang Siantar Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar 2022 - 2027, Visi Wali Kota Pematang Siantar dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar untuk periode 2022-2027 adalah **"Mewujudkan Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas"**

Selanjutnya, untuk mewujudkan Visi tersebut, ada 5 Misi pembangunan daerah, salah satu misi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar adalah Misi 3 : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan coorporate governance.**

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Komunikasi dan informatika sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Bidang Informasi dan Komunikasi, Statistik dan persandian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam RPJMD untuk Misi 3 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan sasaraan Tata kelola pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut diatas.

Sesuai dengan RPJMD 2022-2027, maka indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota pematang Siantar yang mengacu pada tujuan dan sasaaran RPJMD dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel TC-28

Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Thn 1	Thn 2	Thn3	Thn 4	Thn 5	
1.	Indeks SPBE	1,56	2,854	2,994	3,187	3,409	3,563	3,563
2.	Indeks Smart City	n/a	n/a	n/a	0.8	1.0	1.2	1.2
3.	Nilai AKIP OPD	C	CC	B	B	B	B	B
4.	Indeks Pembangunan Statistik	n/a	n/a	2	2	3	3	3
5.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	n/a	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
6.	Indeks KAMI	n/a	100 % (Skors 133)	100 % (Skors 208)	100 % (Skors 270)	100% (Skors 408)	00 % (Skors 505)	100 % (Skors 505)
7.	Inovasi Perangkat Daerah	n/a	n/a	1	1	1	1	4
8.	Indeks Kepuasan masyarakat	80	80	80	80	85	85	85

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 merupakan serangkaian rencana tindakan dalam rangka mempertajam arah kebijakan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dengan perkembangan dinamika yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan program/kegiatan, penganggaran dan evaluasi yang berorientasi pada hal yang ingin dicapai untuk pengembangan ke depan.

Untuk itu dengan disusunnya Perubahan Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam mengimplementasikan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota pematangsiantar secara baik, transparansi dan akuntabel.

Demikian disampaikan, dengan harapan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal.

Pematangsiantar,
Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Pematangsiantar



JOHANNES SIHOMBING, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.198103251991121001